

## E-GOVERNMENT – PENYELENGGARAAN

2017

PERBUP NO. 49, BD. 2017. NO. 49 KAB. PEMALANG : 11 HLM

### PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN EGOVERNMENT PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK** : - Dalam rangka penggunaan teknologi informasi oleh Pemerintah Kabupaten Pemalang perlu mengatur penyelenggaraan E-Government.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 82 Tahun 2012; PP No. 18 Tahun 2016; Perpres No. 96 Tahun 2014; Inpres No. 3 Tahun 2003; Permenkominfo No. 41 Tahun 2007; Permenkominfo No. 17 Tahun 2009; KepmenKominfo No. 57 Tahun 2003; Perda No. 12 Tahun 2016; Perda No. 13 Tahun 2016; Perbup No. 59 Tahun 2016.
  - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penyelenggaraan E-Government Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur pula Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Perencanaan, Kebijakan, Kelembagaan, Infrastruktur, Aplikasi, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian, Penutup.
- CATATAN** : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Oktober 2017
- Terdiri atas 17 Pasal.